

Efektivitas Strategi Pelatihan *Participatory Action Research* (PAR) berbasis *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Performa *Hard Skill* dan *Soft Skill* dalam Berwirausaha: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

¹*Deka Dyah Utami, ¹Herlina Ike Oktaviani, ¹Inawati, ¹Katherin Ananda Yuliani, ¹Yulias Prihatmoko, ¹Nindyawati, ²Keppi Sukesni, ³Adi Santosa

Universitas Negeri Malang, Indonesia

Universitas Brawijaya, Indonesia

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, Indonesia

*Correspondence email: deka.dyah.utami.fip@um.ac.id

Abstrak

DOI:

<https://doi.org/10.47134/comdev.v6i2.1783>

*Correspondensi: Deka Dyah Utami

Email: deka.dyah.utami.fip@um.ac.id

Received: 28-10-2025

Accepted: 16-11-2025

Published: 01-12-2025



Copyright: © 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Penelitian ini mengkaji efektivitas strategi pelatihan berbasis *Participatory Action Research* (PAR) berbasis *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam meningkatkan Performa *Hard Skill* dan *Soft Skill* warga binaan perempuan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Isu utama yang dibahas adalah kurangnya keterampilan berwirausaha dan stigma negatif yang melekat sehingga mempersulit WBP untuk mendapatkan pekerjaan setelah masa pembebasan. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan PAR dengan siklus Perencanaan–Aksi– Observasi – Refleksi. Jumlah sampel terlibat sebanyak 93 responden warga binaan wanita. Program pelatihan dilakukan dengan melibatkan kolaborasi pendidikan tinggi, dunia industri, instansi pemerintahan dan mitra productive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan strategi pelatihan PAR berbasis CSR melalui kolaborasi dengan beberapa mitra, dapat meningkatkan keterampilan hardskill dan softskill dalam berwirausaha. Temuan ini merekomendasikan potensi PAR sebagai strategi efektif untuk memberikan perubahan positif dan pengetahuan kepada warga binaan perempuan (WBP) yaitu dengan cara membekali WBP dengan kompetensi mandiri yang diperlukan untuk reintegrasi ke masyarakat secara sukses.

Kata Kunci: Participatory Action Research, Hard Skill, Soft Skill, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Berwirausaha.

Abstract

This study examines the effectiveness of Participatory Action Research (PAR)-based training strategies in improving the hard skills and soft skills of female inmates in the Women's Correctional Institution. The main issue discussed is the negative stigma attached, which makes it difficult for female inmates to find work after release. The type of research is qualitative, employing a PAR (Planning-Action-Observation-Reflection) approach with a cycle of planning, action, observation, and reflection. The number of samples involved was 93 female inmate respondents. The training program was carried out through collaboration between higher education, the industrial world, government agencies, and productive partners. The results of the study indicate that the PAR-based CSR strategy, through collaboration with several partners, can improve hard skills and soft skills in entrepreneurship. These findings suggest the potential of PAR as an effective strategy to promote positive change and knowledge among female inmates by equipping them with the independent competencies necessary for successful reintegration into society.

Keywords: Participatory Action Research, Hard Skills, Soft Skills, Women's Correctional Institutions, Entrepreneurial Skills

I. PENDAHULUAN

Data statistik dari World Prison Brief mengenai jumlah warga binaan perempuan (WBP) dan tahanan di Indonesia menunjukkan adanya tren kenaikan yang mengkhawatirkan dan menjadi tantangan besar bagi sistem pemasyarakatan nasional. Sejak tahun 2010, jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) terus merangkak naik secara drastis, dari hanya 117.863 orang pada tahun 2010 menjadi 249.056 orang pada tahun 2020 (Rizaty, 2022). Peningkatan ini mencapai puncaknya baru-baru ini, dengan catatan 269.275 WBP per November 2023, sebuah angka yang menempatkan Indonesia di urutan ketujuh secara global sebagai negara dengan jumlah WBP terbanyak menurut *World Prison Brief* (Naurah, 2023). Lonjakan populasi penghuni ini secara langsung memicu krisis kelebihan kapasitas (*overcrowding*) yang parah, daya tampung Lapas dan Rutan jauh melebihi batas sehingga menimbulkan berbagai masalah krusial di balik jeruji besi (SARAGIH, 2023). Krisis kelebihan kapasitas ini diperparah oleh dominasi kasus narkoba dan keterlibatan perempuan sebagai kurir menjadi sorotan khusus (Anastasia, 2012).

Berdasarkan hasil observasi di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang, ditemukan hal serupa. Jumlah WBP di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang adalah 419 WBP, ditambah dengan 22 tahanan, sehingga total penghuninya adalah 441 orang. Mayoritas dari mereka, sekitar 80%, terjerat kasus narkoba (Saputra, 2024). Mayoritas WBP terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba yaitu mayoritas sebagai kurir. Berdasarkan hasil wawancara, penyebab utama dilakukan tindakan tersebut dikarenakan motif kesulitan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari sehingga sangat mudah bagi mereka tergiur dengan tawaran yang dijanjikan sebagai kurir sangat besar.

Data menunjukkan bahwa motif yang melatarbelakangi keterlibatan mereka sangat erat kaitannya dengan masalah ekonomi dan kerentanan sosial. Mayoritas perempuan yang terjerumus sebagai kurir narkoba, meskipun risiko hukumannya sangat berat, berasal dari latar belakang sosial-ekonomi menengah ke bawah (Puspitasari, 2020). Laporan dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) pada tahun 2019 menyoroti bahwa di antara 168 kasus keterlibatan perempuan dalam perdagangan narkoba yang dipantau, profesi Ibu Rumah Tangga (IRT) mendominasi dengan 30 kasus, disusul oleh karyawan (14 kasus) (Puspitasari, 2020). Fenomena ini mengindikasikan bahwa tekanan finansial, kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan terbatasnya peluang kerja akibat pendidikan rendah menjadi "pintu gerbang" utama yang dimanfaatkan oleh jaringan kriminal untuk menjebak mereka ke dalam lingkaran perdagangan ilegal (Cullen & Hoyle, 2025).

Secara ideal, setelah menjalani masa pidana dan memperoleh kebebasan, mantan WBP memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam kerangka hukum tersebut, mantan WBP yang telah selesai menjalani hukuman berhak memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi, termasuk hak untuk bekerja, mengakses pendidikan, layanan kesehatan, serta program reintegrasi sosial. Prinsip utama sistem pemasyarakatan menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar mantan WBP dapat kembali berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab (Presiden RI, n.d.).

Namun faktanya, di Indonesia stigma negatif masyarakat terhadap mantan WBP masih menjadi isu sosial yang terus dibahas karena berdampak langsung terhadap proses reintegrasi mereka ke lingkungan

sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala administrasi Lapas, meskipun berbagai program pembinaan dan pemberdayaan telah dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dan WBP benar-benar telah memiliki keterampilan dan perilaku yang lebih baik, namun mantan WBP sering kali menghadapi penolakan sosial dan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam akses terhadap pekerjaan dan partisipasi sosial. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memiliki persepsi negatif terhadap mantan WBP, dengan anggapan bahwa mereka berpotensi mengulangi tindak pidana (Rahmi et al., 2021).

Merespons tantangan ini secara nasional dan global, upaya telah ditingkatkan untuk mengintegrasikan pendidikan dan rehabilitasi vokasional berbasis gender di dalam lapas. Di Indonesia, berbagai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) aktif menyelenggarakan program keterampilan praktis seperti pelatihan membatik, menjahit, hingga membuat kerajinan tangan (Chasanah et al., 2019); (Sitorus, 2018). Pelaksanaan program ini tidak hanya bertujuan mengisi waktu luang WBP, tetapi secara krusial bertujuan memberikan keterampilan yang layak secara komersial dan sertifikasi resmi. Sebagai contoh, program pelatihan batik di LPP Semarang, yang didukung oleh UNODC, dirancang untuk meningkatkan prospek kerja WBP setelah mereka dibebaskan, sehingga secara langsung menekan potensi residivisme yang tinggi (UNODC, 2019)). Upaya ini sejalan dengan Bangkok Rules yang menyerukan perlakuan yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan, mengakui bahwa pendidikan adalah kunci pemberdayaan sosial dan ekonomi (Ryder, 2025).

Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan kewirausahaan dan pengembangan kompetensi selama masa pembinaan berkontribusi signifikan terhadap kesiapan ekonomi dan keberhasilan reintegrasi sosial mantan WBP (Faisal et al., 2025). Selain itu, hasil penelitian lain juga menemukan bahwa hambatan utama dalam proses reintegrasi sosial meliputi stigma masyarakat, keterbatasan pendidikan, serta minimnya akses ke dunia kerja pasca pembebasan (Fajar & Murakami, 2024). Oleh karena itu, negara dan masyarakat berkewajiban menciptakan kondisi yang mendukung, termasuk penyediaan pelatihan kerja, pendampingan karier, serta kampanye penghapusan stigma sosial agar mantan WBP dapat kembali menjalankan kehidupannya secara bermartabat.

Meskipun program pemberdayaan dan vokasional telah berjalan, WBP menghadapi hambatan signifikan dalam reintegrasi sosial yang dapat membatalkan semua upaya rehabilitasi yang telah dilakukan. Secara global, perempuan yang dipenjara seringkali kembali ke kondisi sosial-ekonomi yang tidak stabil dan rentan (Crowley, 2019). Di Indonesia, hal ini diperparah dengan stigma sosial yang berat dan ketidaksetaraan gender di masyarakat, yang membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan dan pengakuan, bahkan setelah mereka bersertifikat keterampilan (Gusnawati, 2025). Selain itu, banyak dari WBP ini adalah ibu yang terpisah dari anak-anak mereka, sehingga tantangan emosional dan peran keluarga (yang diakui oleh UU No. 22 Tahun 2022 Pasal 62) menjadi beban tambahan yang memerlukan pendekatan pembinaan yang lebih humanis dan holistik (Ifra, 2022). Oleh karena itu, keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada program di dalam lapas, tetapi juga pada dukungan masyarakat dan kebijakan yang gender-responsive pasca-pembebasan.

Meskipun data spesifik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Indonesia mengenai tingkat pengangguran mantan WBP secara agregat bervariasi, pola umum menunjukkan bahwa mereka menghadapi hambatan struktural yang akut. Hambatan terbesar adalah stigma sosial yang mendalam, yang secara efektif memblokir akses mereka ke peluang kerja yang stabil. Laporan dari badan

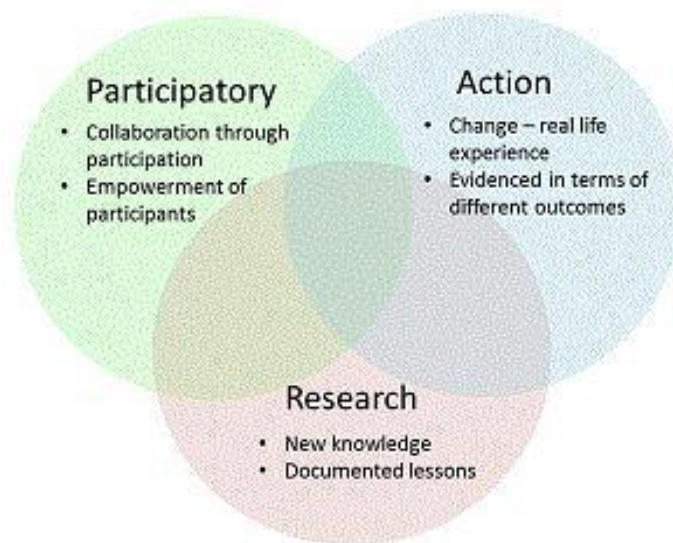
seperti UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) dan penelitian terkait menunjukkan bahwa WBP perempuan sering mengalami kesulitan besar dalam mendapatkan pekerjaan karena latar belakang kriminal mereka, bahkan setelah memiliki sertifikat keterampilan vokasional (UNODC, 2019). Stigma ini tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga sosial, yang mana diskriminasi tersebut memperbesar risiko mereka untuk kembali terjerumus pada tindak pidana (*recidivism*), sehingga menyulitkan upaya reintegrasi total ke dalam masyarakat (Crowley, 2019).

Program vokasional telah dilakukan dalam lapas sering kali hanya menyediakan pelatihan keterampilan dasar (*hard skills*) yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan *soft skill*, kebutuhan pasar atau jiwa kewirausahaan. Dampak sosial dan ekonomi dari defisit keterampilan ini sangat nyata: kurangnya kompetensi, ditambah dengan beratnya stigma sosial (Crowley, 2019), menyebabkan mereka sulit bersaing dalam mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha. Konsekuensinya, tingkat kepercayaan diri mereka tetap rendah, dan yang paling mengkhawatirkan, ini meningkatkan potensi *recidivism* (pengulangan tindak pidana) karena mereka kembali terjerumus pada keterbatasan ekonomi yang sebelumnya menjadi motif kriminal mereka (Gusnawati, 2025). Kondisi ini menciptakan kesenjangan signifikan antara kebutuhan keterampilan yang relevan—baik *hard skills* yang komersial maupun *soft skills* seperti negosiasi dan manajemen risiko—dan ketersediaan pelatihan yang benar-benar efektif dan komprehensif di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) di Indonesia.

Berdasarkan adanya kesenjangan dalam kajian sebelumnya, penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah (*novelty*) yang penting, terutama dalam konteks pemberdayaan WBP dengan penerapan strategi *Participatory Action Research* (PAR) berbasis *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap *Hard skill* dan *Soft skill* Berwirausaha di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Pendekatan ini berbeda dari model yang sudah ada karena tidak hanya menekankan pada pelatihan keterampilan teknis (*hard skills*) dan keterampilan non teknis (*soft skills*) secara bersamaan, tetapi juga mengusung konsep pemberdayaan kolaboratif yang melibatkan kerja sama antara perguruan tinggi, lembaga pemerintah (Lapas), dan sektor swasta (CSR). *Participatory Action Research* (PAR) dilaporkan efektif karena melibatkan subjek penelitian sebagai agen perubahan aktif, sehingga pelatihan menjadi relevan dengan kebutuhan dan konteks lokal mereka, serta secara signifikan meningkatkan resiliensi, *self-efficacy* dan penerimaan diri (Rahmat & Mirnawati, 2019). Program *Corporate Social Responsibility* (CSR), dapat meningkatkan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran dalam target program (Rahmadani et al., 2019), program CSR dipadukan dengan PAR untuk memastikan keberlanjutan program pelatihan, pasokan bahan baku, peningkatan kualitas produk, peningkatan promosi dan penyerapan tenaga kerja bagi WBP setelah masa tahanan selesai.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji: Efektivitas Strategi Pelatihan *Participatory Action Research* (PAR) berbasis *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Performa *Hard Skill* dan *Soft Skill* dalam Berwirausaha: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

II. METODE



Gambar 1. Unsur-unsur dalam penelitian *Participatory Action Research* (Allen, 2016)

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan utama yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Berbasis Partisipatif (*Participatory Action Research*–PAR) oleh Kurt Lewin. Pendekatan ini memungkinkan subjek penelitian terlibat aktif sebagai peserta sekaligus agen perubahan dalam proses pelatihan. Lewin, seorang psikolog sosial, menciptakan istilah "penelitian tindakan" pada tahun 1944 untuk menekankan metode yang secara bersamaan menyelidiki suatu masalah dan mengambil tindakan untuk menyelesaikannya, menjembatani kesenjangan antara teori abstrak dan praktik dunia nyata (Christens et al., 2020). Strategi PAR dipilih karena sesuai dengan tujuan pemberdayaan, memungkinkan penyesuaian program secara dinamis berdasarkan kebutuhan spesifik WBP, dan menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik rehabilitasi.

Subjek penelitian ini adalah WBP yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Kota Malang. Total sembilan puluh tiga (93) responden dilibatkan sebagai peserta aktif dalam program pelatihan dan pembinaan. Subjek penelitian dipilih berdasarkan potensi risiko tinggi terhadap *recidivism* pasca-pembebasan. Penelitian ini didukung oleh kolaborasi multi-pihak yang melibatkan akademisi, pihak Lapas, dan mitra industri yaitu Rumah BUMN. Kemitraan dengan Rumah BUMN, yang merupakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari bank BRI, bertujuan mengintegrasikan pelatihan kewirausahaan digital dan pengembangan UMKM lokal, sehingga memastikan *link and match* antara keterampilan yang diajarkan dengan kebutuhan pasar.

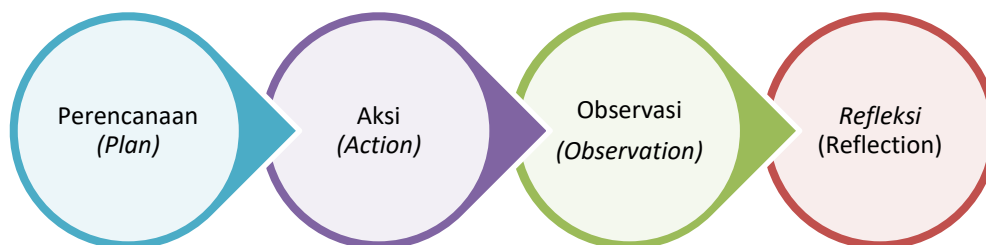
Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kuesioner terstruktur (untuk pengumpulan data kuantitatif) dan pedoman wawancara mendalam (untuk pengumpulan data kualitatif). Kuesioner dirancang untuk mengukur dua variabel dependen utama: *hard skills* kewirausahaan (produksi, pemasaran digital, keuangan dasar) dan *soft skills* yaitu *self-efficacy*, dan kemampuan komunikasi. Data kuantitatif dikumpulkan melalui proses pra-pelatihan (survei awal) sebelum intervensi dimulai dan pasca-pelatihan (survei akhir) setelah siklus PAR selesai.

Tabel 2.1 Rubrik indikator pengukuran Hard skill dan Soft skill

No	Aspek	Indikator	Σ Pernyataan
1	<i>Hardskills</i>	Produksi	5
		Pemasaran digital	5
		Keuangan dasar	6
2	<i>Softskills</i>	<i>Self-efficacy</i>	6
		<i>Public Speaking</i>	6
3	<i>Resilience</i>	Peningkatan Keterampilan	6
		Keyakinan Berhasil	4
		Kebermanfaatan	4
		Peningkatan Pengetahuan	4
		Kepercayaan Diri	4

Prosedur pengumpulan data PAR dilaksanakan melalui serangkaian siklus berulang, yang meliputi perencanaan bersama, aksi (pelatihan), observasi, dan refleksi. Pengujian bertujuan menemukan apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata *hard skills* dan *soft skills* antara kondisi sebelum dan setelah pelatihan, sehingga dapat memvalidasi efektivitas intervensi PAR berbasis CSR. Sementara itu, analisis data kualitatif dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperkaya temuan kuantitatif, memberikan pemahaman mendalam mengenai proses perubahan perilaku WBP dan dinamika kolaborasi dengan Rumah BUMN sebagai CSR.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 2. Tahapan dalam penelitian *Participatory Action Research* Menurut Kurt Lewin.

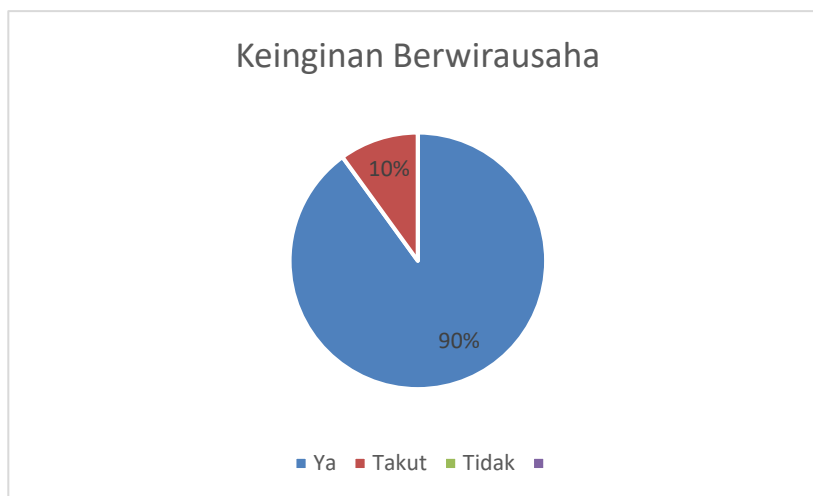
Tahap *Plan* (Perencanaan) melibatkan seluruh mitra dalam merancang intervensi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan WBP. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan melalui wawancara dan observasi awal di Lapas untuk mengidentifikasi potensi, minat, serta kendala WBP dalam berwirausaha. Selanjutnya dilakukan diskusi lintas lembaga antara Universitas Negeri Malang, Rumah BUMN, dan pihak Lapas untuk menentukan fokus pelatihan yang relevan dan aplikatif. Tahap ini menghasilkan rumusan tujuan pelatihan yang menekankan peningkatan *hard skill*—meliputi pemodalannya, penyusunan *business model canvas*, dan legalitas usaha—serta *soft skill* seperti pengembangan motivasi dan *public speaking*. Pada

akhirnya, disusun desain pelatihan yang mencakup jadwal, metode (ceramah interaktif, simulasi, diskusi, dan praktik langsung), serta instrumen evaluasi performa peserta.

Tahap *Action* (Tindakan) merupakan pelaksanaan pelatihan secara kolaboratif sesuai keahlian masing-masing mitra. Rangkaian pelatihan dimulai dengan materi bantuan pemodalan UMKM oleh Rumah BUMN selaku CSR Bank BRI, yang mencakup pemahaman mekanisme akses modal, strategi pengajuan proposal, hingga simulasi studi kasus pembiayaan. Peserta pelatihan juga melakukan praktik pengisian formulir dan perencanaan penggunaan dana. Materi berikutnya adalah *Business Model Canvas* (BMC), di mana peserta memahami konsep dasar BMC dan menyusunnya untuk ide usaha masing-masing. Universitas Negeri Malang memberikan dua materi inti, yakni pengembangan motivasi “Masa Depan Milik Kita Semua” yang menekankan refleksi, penguatan kepercayaan diri, dan pembentukan *growth mindset* melalui sesi berbagi dan permainan motivasional, serta materi *public speaking* yang melatih teknik komunikasi persuasif dan presentasi produk melalui sesi *pitching*. Rumah BUMN kemudian menutup sesi dengan materi legalitas usaha, mencakup penyuluhan pembuatan NIB, izin usaha mikro, administrasi dasar, serta pendampingan pendaftaran melalui sistem OSS.

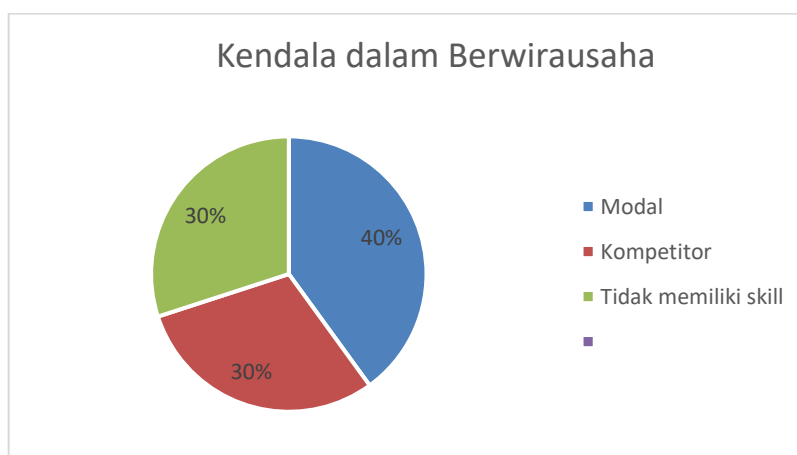
Tahap *Observe* (Pengamatan) bertujuan mengumpulkan data empiris untuk menilai efektivitas pelatihan dalam meningkatkan *hard skill* dan *soft skill* peserta. Pengamatan dilakukan melalui observasi langsung selama kegiatan untuk melihat tingkat partisipasi peserta, penggunaan instrumen survei awal–akhir guna mengukur peningkatan kemampuan teknis dan interpersonal, wawancara serta FGD untuk menangkap pengalaman belajar peserta dan fasilitator, serta dokumentasi berupa foto, video, dan catatan refleksi harian yang menjadi dasar evaluasi.

Tahap *Reflection* (Refleksi) digunakan untuk meninjau kembali hasil tindakan dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Refleksi dilakukan melalui diskusi evaluatif antara tim peneliti Universitas Negeri Malang, Rumah BUMN, dan pihak Lapas untuk menilai capaian pelatihan. Data dianalisis untuk melihat perubahan perilaku dan performa WBP dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya disusun laporan reflektif serta naskah publikasi ilmiah mengenai efektivitas pelatihan berbasis PAR sebagai model pemberdayaan berkelanjutan di Lapas. Tahap ini juga menghasilkan rencana tindak lanjut berupa mentoring kewirausahaan, jejaring usaha pasca bebas, dan peluang inkubasi bisnis dengan dukungan Rumah BUMN. Secara keseluruhan, pelatihan ini menghasilkan output langsung berupa peningkatan kompetensi *hard skill* seperti pemodalan, perencanaan bisnis, dan legalitas usaha, serta *soft skill* seperti kemampuan komunikasi, motivasi, dan kepemimpinan. Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah terbentuknya *entrepreneurial mindset* dan kesiapan WBP untuk berwirausaha mandiri setelah bebas, sehingga mendukung program *Human Performance Improvement* di lingkungan Lapas. Berikut adalah data kualitatif yang diperoleh sebelum dan setelah intervensi pelatihan.



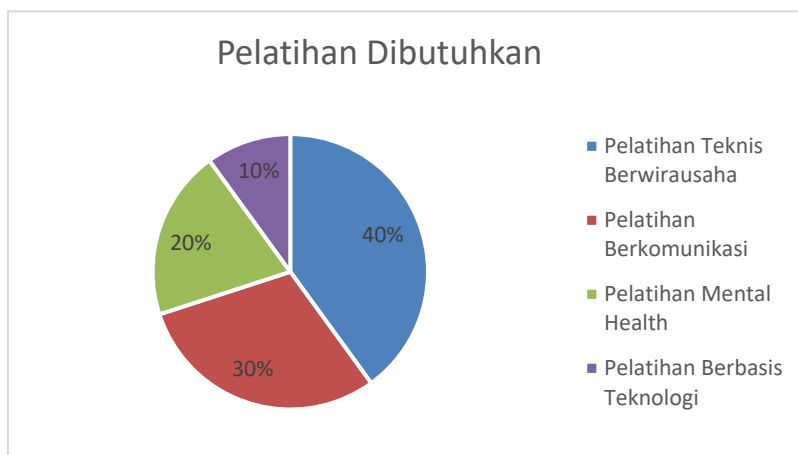
Gambar 3. Diagram Perbandingan Keinginan Berwirausaha WBP

Sebelum pelatihan, diberikan survey awal yang bertujuan menganalisis kebutuhan belajar WBP. Diagram tersebut menunjukkan bahwa mayoritas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk berwirausaha, yaitu sebesar 90%. Hanya 10% yang merasa takut untuk memulai usaha, sementara tidak ada responden yang menyatakan tidak berminat sama sekali. Temuan ini menggambarkan bahwa motivasi dan minat WBP dalam membangun kemandirian ekonomi sebenarnya sangat kuat, sehingga intervensi pelatihan dan pendampingan wirausaha berpotensi memberikan dampak signifikan dalam mempersiapkan mereka menjalani kehidupan yang lebih produktif setelah masa pembinaan.



Gambar 4. Diagram Faktor Kendala Berwirausaha WBP

Diagram tersebut menunjukkan bahwa kendala terbesar dalam berwirausaha adalah keterbatasan modal, yang mencapai 40% dari total hambatan yang dihadapi. Selain itu, sebanyak 30% responden menyatakan bahwa keberadaan kompetitor menjadi tantangan signifikan yang mempengaruhi keberlanjutan usaha mereka. Sementara itu, 30% lainnya mengalami kendala karena belum memiliki keterampilan yang memadai untuk mengembangkan usaha. Data ini menggambarkan bahwa aspek finansial, persaingan pasar, dan kapasitas diri merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan dalam mendukung keberhasilan wirausaha.



Gambar 5. Diagram Jenis Pelatihan Dibutuhkan WBP

Diagram tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan pelatihan WBP mencakup empat area utama, yaitu Pelatihan Teknis Berwirausaha (40%) sebagai kebutuhan terbesar, diikuti Pelatihan Berkomunikasi (30%), Pelatihan Mental Health (20%), dan Pelatihan Berbasis Teknologi (10%). Beragamnya kebutuhan ini kemudian diakomodasi secara komprehensif melalui Pelatihan *Participatory Action Research* (PAR) berbasis *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang dirancang untuk menjawab seluruh aspek tersebut secara terpadu. Dalam pelatihan ini, peserta tidak hanya mendapatkan keterampilan teknis dan komunikasi, tetapi juga dukungan kesehatan mental, literasi teknologi, serta sesi motivasi khusus yang dibawakan oleh seorang motivator profesional untuk memperkuat kesiapan mental dan semangat berwirausaha para WBP.

Tabel 1. Materi Pelatihan PAR berbasis CSR

Hari	Kegiatan	PIC
Sesi 1	Pembukaan	Kepala Lapas "Yunengsih, Bc.IP, S.Sos, M.H" Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang
	Sambutan	Ketua Tim Pengabdian Dr. Deka Dyah Utami, M.Pd Universitas Negeri Malang
	Survey Awal	Panitia
Sesi 2	Materi Hardskill: "Bagaimana memulai berani berwirausaha sesuai passion? & Bagaimana Peran Rumah BUMN"	Koordinator Rumah BUMN CSR BRI Indah Dwi Pangestu
	Motivasi: "Masa Depan Indah Miliki Siapa?"	Motivator: Dr. Hj. Umi Dayati, M.Pd Universitas Negeri Malang
	Materi Hardskill: "Growth Strategist"	Narasumber Mitra Rumah BUMN CSR BRI Yunida Paramita, SAB
Sesi 3	Materi Softskill: "Public Speaking"	Narasumber Wigatha Adji Hariwasto Universitas Negeri Malang
	Materi Teknologi: "Digital Content"	Narasumber Nafaizah Vebri Firdausi Universitas Negeri Malang

Survey Akhir
Penutup

Panitia
Panitia

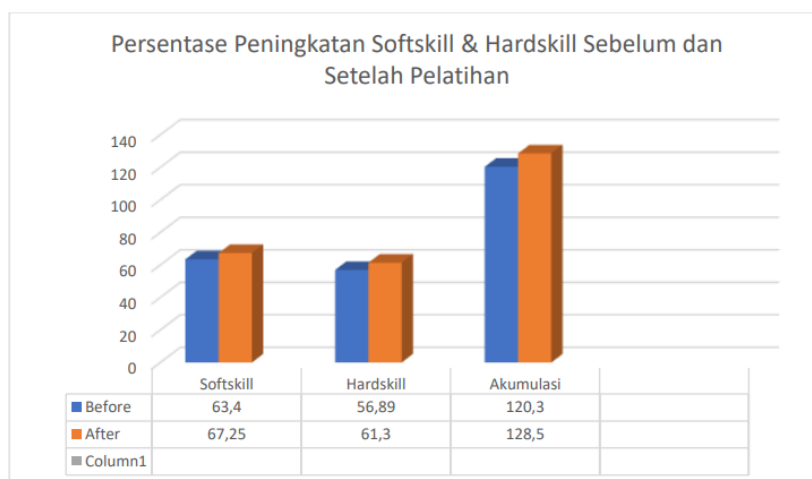
Tabel tersebut menggambarkan rangkaian materi Pelatihan PAR berbasis CSR yang dilaksanakan secara terstruktur dalam tiga sesi utama. Pada Sesi 1, kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang, dilanjutkan sambutan dari Ketua Tim Pengabdian Universitas Negeri Malang, serta pelaksanaan survei awal oleh panitia untuk memetakan kebutuhan peserta. Sesi 2 berisi materi *hardskill* terkait dasar-dasar memulai wirausaha sesuai *passion* dan pemahaman tentang peran Rumah BUMN, yang disampaikan oleh Koordinator Rumah BUMN CSR BRI. Sesi ini juga menghadirkan sesi motivasi berjudul “*Masa Depan Indah Milik Siapa?*” oleh motivator dari Universitas Negeri Malang, serta materi lanjutan mengenai strategi pertumbuhan usaha oleh narasumber dari Rumah BUMN. Pada Sesi 3, peserta dibekali materi *softskill* berupa *public speaking* dan *digital content* oleh dua narasumber dari Universitas Negeri Malang. Kegiatan ditutup dengan survei akhir dan penutupan oleh panitia, sebagai bentuk evaluasi dan refleksi atas keseluruhan proses pelatihan.



Gambar 6. Kolaborasi Lembaga Pemasarakatan, Universitas dan CSR dalam Pemberdayaan WBP

Gambar tersebut menunjukkan suasana kegiatan pelatihan yang melibatkan kolaborasi antara Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Malang, Universitas Negeri Malang, dan mitra *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Rumah BUMN. Tampak para narasumber duduk di meja panel di depan peserta, menyampaikan materi terkait peningkatan *human performance* melalui pendampingan *hardskill* dan *softskill*. Spanduk besar di belakang panel menegaskan tema kegiatan, yaitu penguatan kapasitas WBP melalui pendekatan pemberdayaan berbasis masyarakat, yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2024 di Aula LPP berlokasi di Malang. Kegiatan ini mencerminkan sinergi multipihak dalam

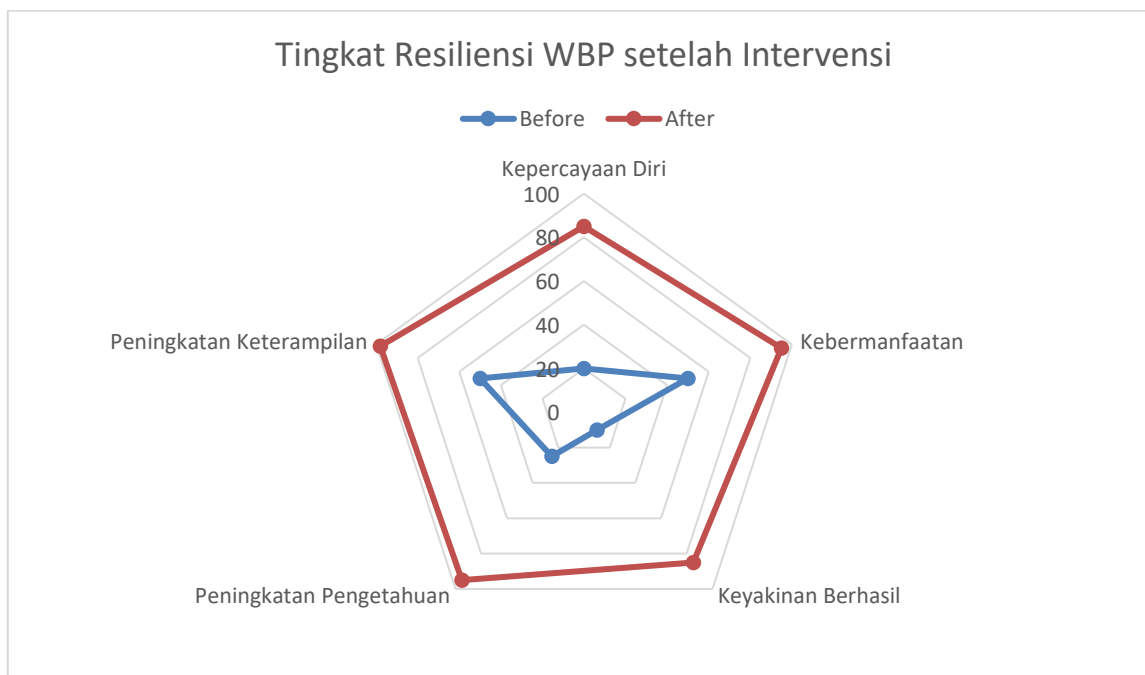
memberdayakan WBP agar memiliki kesiapan kompetensi saat kembali ke masyarakat. Para peserta yang hadir tampak mengikuti sesi dengan antusias, sementara dekorasi ruangan, penyusunan tempat duduk, dan kehadiran perwakilan dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa kegiatan ini disiapkan secara profesional dan kolaboratif. Hadirnya universitas sebagai penyedia keahlian akademik, CSR sebagai mitra pendukung sumber daya, serta Lapas sebagai fasilitator utama memperlihatkan bagaimana pendekatan kolaboratif mampu menciptakan intervensi pelatihan yang lebih komprehensif dan berdampak.



Gambar 7. Grafik Perbandingan Data Sebelum dan Setelah Pelatihan

Hasil intervensi menunjukkan adanya peningkatan pada keterampilan *hard skill* kewirausahaan WBP setelah implementasi pelatihan. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, nilai rata-rata hard skill sebelum intervensi (*survey awal*) tercatat sebesar 56,89%. Setelah WBP menjalani program pelatihan berbasis *Participatory Action Research (PAR)*, nilai rata-rata keterampilan teknis ini meningkat menjadi 61,3%. Disimpulkan bahwa strategi yang partisipatif dan kolaboratif efektif dalam mentransfer pengetahuan teknis dan kemampuan praktis yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan wirausaha di kalangan WBP.

Selain keterampilan teknis, penelitian ini juga mengamati peningkatan substansial pada keterampilan *softskill* dan resiliensi WBP. Nilai rata-rata soft skill sebelum intervensi tercatat sebesar 63,4%. Setelah intervensi berbasis PAR, nilai rata-rata ini menunjukkan kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan *hard skills*, yaitu mencapai 67,25%, dengan peningkatan mutlak sebesar 3,85 poin persentase. Disimpulkan bahwa implementasi pelatihan berbasis PAR secara signifikan dapat meningkatkan keterampilan non-teknis (*softskills*) kewirausahaan. Peningkatan *soft skills* ini mencerminkan keberhasilan intervensi dalam menumbuhkan aspek-aspek krusial seperti kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, motivasi, dan kesiapan mental untuk menghadapi tantangan pasca-pembebasan. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan partisipatif tidak hanya memberikan transfer keterampilan teknis, tetapi juga secara fundamental mengubah kapasitas psikologis dan interpersonal WBP perempuan. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa model pelatihan PAR terbukti efektif dalam meningkatkan baik *hard skills* maupun *soft skills* WBP perempuan.



Gambar 8. Grafik Peningkatan Aspek Resiliensi Sebelum dan Setelah Intervensi

Grafik tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan pada seluruh aspek respon WBP setelah mengikuti intervensi. Sebelum intervensi, tingkat kepercayaan diri, kebermanfaatan, keyakinan berhasil, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan berada pada kisaran nilai yang relatif rendah. Namun setelah intervensi, seluruh indikator melonjak tajam hingga mendekati atau mencapai tingkat tinggi, mencerminkan bahwa program yang diberikan mampu memperkuat keyakinan diri, meningkatkan persepsi manfaat, menambah pengetahuan, serta mengembangkan keterampilan peserta secara keseluruhan. Berikut disajikan data kualitatif respon dari WBP setelah intervensi.

“Sangat bermanfaat karenanya akhirnya mengetahui bagaimana proses dalam merancang usaha yang akan dijalankan” (R1).

Kutipan dari responden tersebut menggambarkan bahwa peserta merasakan manfaat yang signifikan dari pelatihan yang diberikan, terutama dalam memahami proses perancangan usaha. Peserta yang sebelumnya mungkin belum memiliki gambaran jelas mengenai langkah-langkah memulai dan mengembangkan sebuah bisnis, kini merasa lebih terarah dan memiliki pengetahuan yang lebih sistematis. Pernyataan ini menunjukkan bahwa materi pelatihan mampu menjawab kebutuhan peserta dalam membangun kesiapan wirausaha, sekaligus menegaskan relevansi program dalam membantu mereka merencanakan masa depan secara lebih percaya diri dan terencana.

“Ya saya sangat terbantu dengan adanya rumah BUMN . Saya sangat mendapatkan kemudahan untuk ide kemasan, informasi pasar, perizinan, juga akses permodalan” (R2).

Kutipan dari responden menunjukkan bahwa keberadaan Rumah BUMN memberikan dampak nyata dan positif bagi peserta dalam mempersiapkan usaha mereka. Peserta merasakan kemudahan yang signifikan, mulai dari pengembangan ide kemasan produk, memperoleh informasi tentang pasar, memahami proses perizinan, hingga mendapatkan akses permodalan. Hal ini menegaskan bahwa Rumah BUMN tidak

hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pendamping komprehensif yang membantu mengurangi berbagai hambatan teknis yang biasanya dihadapi calon wirausahawan. Dukungan tersebut memberikan rasa percaya diri dan membuka peluang lebih besar bagi peserta untuk membangun usaha yang berkelanjutan.

“Iya, saya akan buktikan setelah bebas, saya akan menjadi lebih baik dari sebelumnya dan menjadi orang yang berkarya” (R3)

Kutipan dari responden mencerminkan tekad kuat dan motivasi personal yang tumbuh setelah mengikuti program pendampingan. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perubahan cara pandang dan optimisme peserta terhadap masa depannya, khususnya setelah bebas nanti. R3 menegaskan komitmennya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan produktif melalui karya, yang mengindikasikan bahwa pelatihan tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mampu menumbuhkan harapan, kepercayaan diri, serta visi positif untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna.

“Pengetahuan yang diberikan sangat bermanfaat nanti waktu pas di luar, semoga bisa mendirikan usaha dengan bantuan mitra BUMN Malang” (R4)

Kutipan dari R4 menunjukkan bahwa peserta merasakan manfaat langsung dari pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan, terutama sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat. Harapan untuk dapat mendirikan usaha dengan dukungan mitra BUMN Malang memperlihatkan adanya rasa percaya diri sekaligus keyakinan bahwa jejaring dan pendampingan dari mitra CSR memiliki peran penting dalam keberhasilan wirausaha mereka. Pernyataan ini menegaskan bahwa program pelatihan tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga membuka peluang kolaborasi nyata yang dapat membantu peserta membangun kemandirian ekonomi setelah bebas nanti.

Temuan ini menegaskan bahwa intervensi yang dilakukan memberikan dampak positif dan nyata terhadap perkembangan WBP. Dalam perspektif AECT (*Association for Educational Communications and Technology*), Teknologi Pendidikan berperan sebagai proses sistematis dalam menciptakan, menggunakan, dan mengelola sumber belajar serta lingkungan belajar untuk memfasilitasi peningkatan kinerja manusia (AECT, 2008). Berdasarkan kerangka tersebut, penerapan Teknologi Pendidikan dapat menjadi solusi strategis dalam mengatasi stigma sosial terhadap mantan WBP melalui pengembangan media pembelajaran yang berorientasi pada kesadaran sosial, literasi digital, dan pelatihan berbasis kompetensi. Dalam kerangka AECT, yang memandang Teknologi Pendidikan sebagai praktik sistematis untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui perancangan, penggunaan, dan pengelolaan sumber belajar (Januszewski & Molenda, 2008), desain pelatihan berbasis kolaborasi yang dimediasi teknologi (*computer-/mobile-supported collaborative learning*) berpotensi meningkatkan performa belajar secara signifikan. Bukti empiris menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif terstruktur memberikan keuntungan akademik dan sosial dibandingkan pembelajaran individual atau kompetitif (Roseth et al., 2008)

Peningkatan yang dicapai selaras dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pelatihan kewirausahaan dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk mengurangi residivisme dan meningkatkan peluang kerja mantan WBP (Cooney, 2012). Secara spesifik, keberhasilan dalam meningkatkan *hard skills* menegaskan bahwa program pelatihan teknis—yang dalam konteks ini dirancang untuk relevan dengan

kebutuhan pasar—telah berhasil mentransfer pengetahuan dan kemampuan praktis. Kenaikan nilai akumulasi keseluruhan menjadi indikator holistik bahwa intervensi berbasis komunitas memiliki dampak positif yang menyeluruh, berbeda dengan model pelatihan tradisional yang sering kali terputus dari realitas pasar dan kebutuhan individu (Harvey et al., 2023).

1. Efektivitas Model *Participatory Action Research* (PAR) dan *Gender-Responsive*

Peningkatan yang diamati, terutama pada aspek *soft skills* dan resiliensi, dapat dikaitkan secara langsung dengan penggunaan metodologi *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan ini, yang menekankan partisipasi aktif WBP sebagai subjek dan agen perubahan, terbukti efektif dalam memberdayakan kelompok marjinal. Hasil ini memperluas temuan (Latupeirissa et al., 2025) yang menyoroti bagaimana pendekatan partisipatif dapat meningkatkan *self-efficacy* dan resiliensi, yang merupakan komponen vital dari *soft skills* kewirausahaan. Dalam konteks WBP perempuan, di mana trauma psikologis dan rendahnya kepercayaan diri sering menjadi hambatan besar pasca-pembebasan, model PAR berfungsi sebagai mekanisme rehabilitasi yang *gender-responsive*. Dengan memberdayakan mereka melalui proses yang kolaboratif, intervensi ini secara implisit memerangi stigma internal dan rasa putus asa, yang sering kali menjadi akar dari tingginya risiko pengulangan tindak pidana (Pettus-Davis et al., 2018).

2. Implikasi Terhadap Kesenjangan Akses dan Stigma Sosial

Meskipun peningkatan keterampilan di dalam Lapas tercapai, tantangan reintegrasi yang diuraikan di pendahuluan (seperti stigma sosial dan pengangguran) tetap menjadi ancaman. Hasil penelitian memperkuat kebutuhan untuk tidak hanya fokus pada *hard skills* dan *soft skills*, tetapi juga pada koneksi eksternal melalui kolaborasi CSR yang melibatkan Rumah BUMN. Kesenjangan antara kebutuhan keterampilan dan peluang kerja ini, yang diperparah oleh rendahnya akses pendidikan awal WBP perempuan (Ryder, 2025), hanya dapat diatasi jika pelatihan dilengkapi dengan jejaring pasar yang nyata. Dalam hal ini peran Rumah BUMN sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) diharapkan mampu memberdayakan dan menjamin masa depan para WBP melalui pembinaan UMKM lokal dan pada akhirnya mengurangi stigma sosial negatif WBP di masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan model PAR berbasis CSR ini tidak hanya memvalidasi hipotesis, tetapi juga menyediakan dasar empiris bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mengadopsi model rehabilitasi yang terintegrasi dengan sektor bisnis dan berkelanjutan. Dengan memastikan *link and match* antara keterampilan yang diajarkan dan permintaan pasar, potensi WBP perempuan untuk berkontribusi pada SDG Goal 5 dan Goal 8 dapat dimaksimalkan, sehingga memutus lingkaran kemiskinan dan kejahatan.

IV. KESIMPULAN

Strategi pelatihan *Participatory Action Research* berbasis kolaborasi multi-pihak yang diterapkan pada warga binaan perempuan (WBP) di Lapas Perempuan efektif dalam meningkatkan keterampilan *hard skills* maupun *soft skills* dalam berwirausaha. Mayoritas WBP perempuan menginginkan berwirausaha dibidang kuliner setelah masa pembebasan. Adapun kontribusi praktis dan kebijakan, penelitian ini memiliki implikasi nyata yang dapat direplikasi. Secara praktis, studi ini menawarkan model kolaborasi tripartit yang inovatif antara akademisi (universitas), lembaga pemerintah (Lembaga Pemasarakatan), dan sektor bisnis melalui program CSR Rumah BUMN. Bukti ini penting untuk merancang kebijakan

rehabilitasi yang lebih maju, yaitu beralih dari sekadar pelatihan keterampilan tradisional menuju rehabilitasi berbasis kewirausahaan digital yang disesuaikan dengan tuntutan pekerjaan masa kini. Sebagai rekomendasi untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi longitudinal guna mengukur dampak jangka panjang model ini terhadap tingkat pengangguran dan *recidivism* mantan WBP perempuan secara berkelanjutan, serta mendalami efektivitas kolaborasi (Universitas, Lapas, dan CSR dan dunia industri) sebagai model pemberdayaan yang terintegrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kemendikbudristek-DRTPM yang telah mendanai kegiatan ini melalui skim Pengabdian tahun anggaran 2024. Juga kepada Pejabat Struktural LAPAS Perempuan Kota Malang yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- AECT. (2008). *AECT Definition - Association for Educational Communications and Technology*. <https://www.aect.org/aect/about/aect-definition>
- Allen, W. (2016). *Participatory action research provides for multiple benefits - learningforsustainability.net*. <https://learningforsustainability.net/post/par/>
- Anastasia, A. (2012). Perempuan Kurir dalam Perdagangan Gelap Narkoba (sebuah Realitas Korban Kekerasan Berlapis). *Indonesian Journal of Criminology*, 4167. <https://www.neliti.com/publications/4167/>
- Chasanah, K., Hidayat, Z., & Publik, J. A. (2019). IMPLEMENTATION OF WORKING PROGRAMS IN EMPOWERMENT OF PRIVATE VOCATIONAL SCHOOL IN COMMUNITY INSTITUTION IN IIA SEMARANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(3), 312–328. <https://doi.org/10.14710/JPPMR.V8I3.24136>
- Christens, B. D., Faust, V., Gaddis, J., Inzeo, P. T., Sarmiento, C. S., & Sparks, S. M. (2020). *Action Research*.
- Cooney, T. (2012). Reducing Recidivism Through Entrepreneurship Programmes in Prisons. *Entrepreneurship and Innovation*, 13(2), 125–133. <https://doi.org/10.5367/ije.2012.0074>
- Crowley, M. (2019). *Toolbox on the UN Bangkok Rules The rehabilitation and social reintegration of women prisoners Implementation of the Bangkok Rules Guide to the rehabilitation and social reintegration of women prisoners: Implementation of the Bangkok Rules*. www.tijthailand.org
- Cullen, D., & Hoyle, C. (2025). Peran faktor sosial ekonomi dalam rezim kebijakan narkoba punitif di Indonesia. In *Centre for Criminology, University of Oxford*.
- Faisal, A., Murwijaya, I., Yosepha, S. Y., & Sukendar, T. (2025). Entrepreneurship Training For Former Prisoners: Enhancing Economic Resilience And Social Reintegration. *Proceedings of the Perbanas International Seminar on Economics, Business, Management, Accounting and IT. Community Services*, 2, 104–111. <https://journal.perbanas.id/index.php/pcs/article/view/1043>
- Fajar, U., & Murakami, T. (2024). Analysis of Robert K. Merton's Adaptation Typology in the Implementation of Social Reintegration Program of Correctional Client. *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 2(2). <https://doi.org/10.61682/RESTORATIVE.V2I2.16>
- Gusnawati, D. (2025). PEREDARAN NARKOTIKA GLOBAL: RESPON HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG TERJEBAK SEBAGAI KURIR DITINJAU BERDASARKAN FEMINIST LEGAL THEORY. *JURNAL MIMBAR HUKUM*, 37 NO 1.
- Harvey, C., Zirnsak, T. M., Brasier, C., Ennals, P., Fletcher, J., Hamilton, B., Killaspy, H., McKenzie, P., Kennedy, H., & Brophy, L. (2023). Community-based models of care facilitating the recovery of

- people living with persistent and complex mental health needs: a systematic review and narrative synthesis. *Frontiers in Psychiatry*, 14, 1259944. <https://doi.org/10.3389/FPSYT.2023.1259944>
- Ifra, I. H. (2022). *Menjawab Kebutuhan Perempuan dalam Perspektif Sistem Pemasarakatan*. <https://www.ditjenpas.go.id/menjawab-kebutuhan-perempuan-dalam-perspektif-sistem-pemasarakatan>
- Januszewski, A., & Molenda, M. (2008). *Educational Technology: A Definition with Commentary* - Google Books. Routledge. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=JO3Yc0UuK74C&oi=fnd&pg=PP2&dq=Januszewski+%26+Molenda&ots=aCB2T1hJMt&sig=C-dhrGfAz6oqZacviaG54WZE0fY&redir_esc=y#v=onepage&q=Januszewski%20%26%20Molenda&f=false
- Latupeirissa, J. J. P., Tu Adi, I. W., & B. Valencia, E. (2025). Empowering Marginalized Groups: Unveiling the Benefits of Community Integration in Public Services Decision-Making. *Journal of Governance and Public Policy*, 12(2), 191–205. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v12i2.22640>
- Naurah, N. (2023, November 6). *Indonesia Tempati Urutan Ketujuh, Inilah 10 Negara dengan Jumlah Narapidana Terbanyak!* - GoodStats. https://goodstats.id/article/indonesia-tempati-urutan-ketujuh-inilah-10-negara-dengan-jumlah-narapidana-terbanyak-5n9Fk#google_vignette
- Pettus-Davis, C., Veeh, C. A., Davis, M., & Tripodi, S. (2018). Gender differences in experiences of social support among men and women releasing from prison. *Journal of Social and Personal Relationships*, 35(9), 1161–1182. <https://doi.org/10.1177/0265407517705492;CTYPE:STRING:JOURNAL>
- Presiden RI. (n.d.). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN*. Retrieved November 25, 2025, from www.bphn.go.id
- Puspitasari, N. (2020, September 1). *Kerentanan Kurir Narkotika Perempuan dan Hukum Yang Tak Peka*. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. <https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2020/09/Kerentanan-Kurir-Narkotika-Perempuan-dan-Hukum-yang-Tak-Peka-Seri-Mondok-LBHM.pdf>
- Rahmadani, R., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Fungsi Corporate social responsibility (CSR) Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Share : Social Work Journal*, 8(2), 203. <https://doi.org/10.24198/share.v8i2.20081>
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2019). MODEL PARTICIPATION ACTION RESEARCH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*. <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/AKSARA/index>
- Rahmi, M., Tahir, H., & Sakka, A. R. A. (2021). Stigma Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana (Studi Kasus Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng). *Phinisi Integration Review*, 4(2), 332. <https://doi.org/10.26858/pir.v4i2.22102>
- Rizaty, M. A. (2022, May 22). *Penghuni Penjara Membludak, Ini Jumlah Narapidana di Indonesia*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/0bfb3cad882adc1/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah-narapidana-di-indonesia>
- Roseth, C. J., Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2008). Promoting Early Adolescents' Achievement and Peer Relationships: The Effects of Cooperative, Competitive, and Individualistic Goal Structures. *Psychological Bulletin*, 134(2), 223–246. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.134.2.223>
- Ryder, J. A. (2025). Enhancing Female Prisoners' Access to Education. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 9(1), 139–149. <https://doi.org/10.5204/IJCJSD.V9I1.1468>

- Saputra, H. Y. (2024, March 7). *80 Persen WBP Lapas Perempuan Malang Karena Narkoba*. <https://jatimtimes.com/baca/307567/20240307/045800/80-persen-wbp-lapas-perempuan-malang-karena-narkoba>
- SARAGIH, F. W. (2023). *DAMPAK OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TEBING TINGGI* [Universitas Islam Sumatera Utara]. <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2665>
- Sitorus, C. N. (2018). KAJIAN TENTANG PEMBERDAYAAN PADA NARAPIDANA PEREMPUAN KASUS NARKOBA DI RUTAN KELAS IIB TANAH GROGOT (Cristina Natalia Damayanti Sitorus). *Journal Pembangunan Sosial* . <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1208>
- UNODC. (2019). *Strengthening rehabilitation opportunities for female offenders in Indonesia*. <https://www.unodc.org/roseap/en/indonesia/2019/01/female-ffenders/story.html>